### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Memajukan kinerja perekonomian adalah salah satu sasaran pembangunan nasional agar terwujudnya lapangan kerja serta lingkungan hidup yang layak untuk semua orang, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keseimbangan antara angkatan kerja dan peluang kerja diperlukan untuk mencapai kesuksesan, namun di Indonesia saat ini jumlah pekerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran (Wulandari et al., 2022)

Di negara berkembang, terutama Indonesia, pengangguran merupakan sebuah fenomena atau permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Pengangguran merupakan mereka yang saat ini tidak punya pekerjaan namun aktif mencari kerja, memulai usaha baru, serta tidak aktif mencari kerja sebab telah diterima bekerja namun belum memulai pekerjaannya. Menurut Prasaja (2013) di Indonesia, pengangguran merupakan masalah besar karena dampaknya akan menimbulkan masalah sosial.

Data dari BPS pada Agustus 2020 menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai tingkat pengangguran yang cukup tinggi , yaitu sebesar 7,07% setelah mengalami kenaikan dari 5,23% pada Agustus 2019. Di tahun 2020, terdapat penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan lonjakan angka pengangguran. Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan peristiwa ini sebagai pandemi di tanggal 11 Maret 2020. Sejak virus ini mulai muncul pada akhir tahun 2019 banyak bisnis yang tutup atau bangkrut akibat dampak pandemi ini yang juga berdampak pada pasar tenaga kerja yang akhirnya berujung pada perusahaan yang melakukan pengurangan pegawai dan menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar (Kemenkeu, 2021).

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, pengangguran merupakan salah satu persoalan makro ekonomi yang paling rumit. Penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal & Mukaromah (2021) menyatakan bahwasanya pengangguran merupakan permasalahan kemasyarakatan yang berdampak pada seluruh penduduk dan juga merupakan permasalahan psikologis yang berdampak pada individu yang terkena dampaknya. Meningkatnya angka kemiskinan dapat mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat apabila masalah pengangguran tidak ditangani secara optimal.

Salah satu permasalahan ekonomi yang perlu diatasi atau dikurangi adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi persoalan yang rumit dan mempunyai sifat multidimensional. Oleh sebab itu, usaha pengentasan kemiskinan harus bersifat luas dan merangkap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketika individu atau kelompok tidak mampu mencapai stabilitas ekonomi yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas hidup tertentu, maka kemiskinan akan terjadi (BPS, 2021).

Banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, yang berjuang melawan kemiskinan. Mengurangi kemiskinan adalah salah satu perhatian paling penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa tujuan pertama dan kedua masing-masing adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, dan untuk mengembangkan komitmen global untuk memberantas segala bentuk kemiskinan (Bappenas, 2018). Semua permasalahan pembangunan berasal dari kemiskinan yang meluas dan angka kemiskinan yang tinggi (Todaro, 2011).

Dari publikasi BPS (2021) diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 turun menjadi 9,41 persen dari 9,82 persen pada tahun sebelumnya. Setiap provinsi mengalami penurunan persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 27,24 persen pada tahun 2019, Papua menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi. Sebagai perbandingan, Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase kemiskinan terendah, yaitu 3,57 persen di tahun 2018 serta 3,47 persen pada tahun 2019.

Pengangguran serta kemiskinan keduanya sering kali digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi seberapa baik perkembangan suatu daerah dalam

kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seseorang dapat mengukur tingkat kesejahteraan tersebut. Pengetahuan, umur panjang dan sehat, serta standar hidup nan layak menjadi tiga komponen dasar yang menentukan penghitungan IPM (Badan Pusat Statistik, 2021). Indikator IPM berhubungan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ketiga, keempat, dan kedelapan, di mana masing-masing dari tiga SDGs mengidentifikasi komponen indikator IPM: hidup sehat serta sejahtera, pendidikan yang bermutu, pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi (Sukmawati, 2021).

Negara berkembang telah banyak yang mencapai pertumbuhan ekonomi. namun belum mampu menurunkan ketimpangan sosial ekonomi atau memberantas kemiskinan, oleh karena itu pembangunan manusia perlu diperhatikan lagi. Selain itu, walaupun memiliki pendapatan yang besar, banyak negara maju belum mampu mengatasi masalah sosial mereka. Ketiga adanya negara-negara berpenghasilan rendah bisa memperoleh tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mereka mampu mengelola seluruh sumber daya yang tersedia secara bijak bagi pengembangan kemampuan dasar manusia (Todaro,2011).

Indonesia memiliki 34 Provinsi yang memberikan gambaran tentang pembangunan manusia yang bervariasi. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa IPM Indonesia tahun 2017 sebesar 70,81 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2021 pada angka 72,29 (BPS, 2021). Karena IPM Indonesia berada pada 70 < IPM < 80 maka pembangunan manusia di Indonesia berstatus tinggi, keadaan ini memperlihatkan bahwa semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang diukur menggunakan komponen dimensi daya beli (pendapatan), pendidikan dan kesehatan masyarakat (Yusuf & Wibowo, 2022).

Dari 34 provinsi di Indonesia, IPM Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat kesembilan. Menurut data Badan Pusat Statistik nilai IPM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 yaitu sebesar 72,65 setelah mengalami kenaikan 0,37% dibandingkan tahun 2020 yang ada pada angka 72,38%. Mengingat nilai

IPM Sumbar berkisar antara 70 hingga 80 persen, maka IPM Provinsi Sumatera Barat tergolong tinggi.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia (Dalam Persen)

	[Metode	Baru]	Indeks	Pemb	angunan
	Manusia	Manusia menurut Provinsi			
	2017	2018	2019	2020	2021
ACEH	70.60	71.19	71.90	71.99	72.18
SUMATERA UTARA	70.57	71.18	71.74	71.77	72.00
SUMATERA BARAT	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65
RIAU	71.79	72.44	73.00	72.71	72.94
JAMBI	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63
SUMATERA SELATAN	68.86	69.39	70.02	70.01	70.24
BENGKULU	69.95	70.64	71.21	71.40	71.64
LAMPUNG	68.25	69.02	69.57	69.69	69.90
KEP.BANGKA BELITUNG	69.99	70.67	71.30	71.47	71.69
KEP. RIAU	74.45	74.84	75.48	75.59	75.79
DKI JAKARTA	80.06	80.47	80.76	80.77	81.11
JAWA BARAT	70.69	71.30	72.03	72.09	72.45
JAWA TENGAH	70.52	71.12	71.73	71.87	72.16
DI YOGYAKARTA	78.89	79.53	79.99	79.97	80.22
JAWA TIMUR	70.27	70.77	71.50	71.71	72.14
BANTEN	71.42	71.95	72.44	72.45	72.72
BALI	74.30	74.77	75.38	75.50	75.69
NUSA TENGGARA BARAT	66.58	67.30	68.14	68.25	68.65
NUSA TENGGARA TIMUR	63.73	64.39	65.23	65.19	65.28
KALIMANTAN BARAT	66.26	66.98	67.65	67.66	67.90
KALIMANTAN TENGAH	69.79	70.42	70.91	71.05	71.25
KALIMANTAN SELATAN	69.65	70.17	70.72	70.91	71.28
KALIMANTAN TIMUR	75.12	75.83	76.61	76.24	76.88
KALIMANTAN UTARA	69.84	70.56	71.15	70.63	71.19
SULAWESI UTARA	71.66	72.20	72.99	72.93	73.30
SULAWESI TENGAH	68.11	68.88	69.50	69.55	69.79
SULAWESI SELATAN	70.34	70.90	71.66	71.93	72.24
SULAWESI TENGGARA	69.86	70.61	71.20	71.45	71.66
GORONTALO	67.01	67.71	68.49	68.68	69.00
SULAWESI BARAT	64.30	65.10	65.73	66.11	66.36
MALUKU	68.19	68.87	69.45	69.49	69.71
MALUKU UTARA	67.20	67.76	68.70	68.49	68.76
PAPUA BARAT	62.99	63.74	64.70	65.09	65.26
PAPUA	59.09	60.06	60.84	60.44	60.62
INDONESIA	70.81	71.39	71.92	71.94	72.29

Sumber:BPS Indonesia,2021

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota (Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	(IPM) Provinsi Sumatera Barat				
	Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	59.25	60.28	61.26	61.09	61.35
Kab. Pesisir Selatan	68.74	69.40	70.08	69.90	70.03
Kab. Solok	67.86	68.60	69.08	69.08	69.24
Kab. Sijunjung	66.60	66.97	67.66	67.74	67.86
Kab. Tanah Datar	70.37	71.25	72.14	72.33	72.46
Kab. Padang Pariaman	68.90	69.71	70.59	70.61	70.76
Kab. Agam	71.10	71.70	72.37	72.46	72.57
Kab. Lima Puluh Kota	68.69	69.17	69.67	69.47	69.68
Kab. Pasaman	64.94	65.60	66.46	66.64	66.77
Kab. Solok Selatan	67.81	68.45	68.94	69.04	69.23
Kab. Dharmasraya		70.86			71.76
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	66.83				68.76
	81.58				
	77.44				78.41
Kota Sawahlunto		71.72			
Kota Padang Panjang	i	77.30			77.97
	79.80				
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	77.91				79.08
Kota Pariaman	i	76.26			
Provinsi Sumatera Barat	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2021

Dapat dilihat pada Tabel 2.2 jika diperhatikan dari IPM antar daerah terdapat perbedaan yang signifikan terutama untuk daerah Kabupaten dan Kota. Angka tersebut masuk dalam kategori rendah hingga sedang untuk wilayah kabupaten yang persentasenya berkisar antara 50 hingga 70 persen, dan kategori tinggi untuk wilayah perkotaan yang persentasenya melebihi 70 persen.

Untuk meningkatkan IPM diterapkan instrument kebijakan fiskal dengan cara menetapkan alokasi anggaran untuk faktor-faktor yang berkontribusi dalam pembangunan manusia. Besarnya alokasi anggaran pemerintah merupakan

gambaran dari peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia. Dapat disimpulkan bahwa, peningkatan pembangunan manusia erat kaitanya dengan besaran alokasi anggaran pemerintah. Salah satunya anggaran dibidang pendidikan, dimana masyarakat miskin mempunyai kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikaan sehingga angka buta huruf dapat ditekan (BPS,2021).

Secara umum, kemiskinan menghalangi orang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pengetahuan dan kemampuan seseorang akan meningkat seiring dengan pendidikan, hal ini menunjukkan betapa investasi pada sektor pendidikan dapat memajukan taraf sumber daya manusia. Di berbagai negara, pendidikan menjadi media guna keluar dari kemiskinan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan pengetahuan dan kemampuan yang lebih besar, yang pada hasilnya dapat menghasilkan produktivitas kerja yang lebih tinggi. Masyarakat miskin mungkin menjadi kurang produktif karena kurangnya akses dalam memperoleh pendidikan (BPS,2021).

Gambar 1.1 Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, 2017-2021

AN	IGGARAN PE	ENDIDIKAN (	(Dalam Triliu	ın)
406,1	431,7	460,3	473,7	540,3
2017	2018	2019	2020	2021
	<u> </u>	NGGARAN PEND	IDIKAN	

Sumber: Kementrian Keuangan

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan ditetapkan minimal 20% dari APBN dan didaerah alokasi minimal 20% dari APBD (Juhro & Trisnanto, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Keuangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dapat dilihat dari Gambar 1.1. Dengan adanya kenaikan anggaran pendidikan yang digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk menempuh jenjang pendidikan diharapkan terjadinya peningkatan terhadap sumber daya manusia yang dapat meningkatkan IPM. Pada kenyataannya meskipun terjadi peningkatan anggaran

pendidikan IPM tidak berubah secara signifikan. Pada tahun 2019 anggaran pendidikan sebesar 460,3 Triliun menyebabkan IPM naik 0,53 persen menjadi 71,92 setelah sebelumya sebesar 71,39 di tahun 2018. Pada tahun 2021 anggaran pendidikan naik sebesar 67 Triliun menjadi 540,3 Triliun setelah sebelumnya sebesar 473,7 Triliun. Meskipun anggaran pendidikan meningkat secara signifikan di 2021 Indeks Pembangunan Manusia hanya meningkat 0,35 persen. Peningkatan tersebut lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Manusia selaku sasaran akhir dari seluruh upaya pembangunan, oleh karena itu pemerataan kesempatan harus tersedia bagi laki-laki maupun perempuan. Indeks Pembangunan Gender berguna untuk menghitung pencapaian pembangunan terkait gender dan menggambarkan hasil kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan (Kemenpppa, 2013). Semakin kecil selisih antara skor rata-rata dari nilai 100 semakin seimbang keberhasilan pembangunan antara laki-laki dan perempuan (Syofya, 2018).

Dari penjelasan-penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap hubungan simultan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat sehingga membuat penelitian berjudul "Model Persamaan Simultan Pada Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2022".

### 1.2 Rumusan Masalah

Menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan adalah sama pentingnya. Dalam teorinya, jika seseorang tidak menganggur, hal ini menunjukkan bahwa ia mempunyai pekerjaan dan sumber pendapatan, dan ia seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pokoknya menggunakan pendapatan tersebut. Kemiskinan tidak akan terjadi jika kebutuhan hidup tercukupi. Dengan demikian, dikatakan bahwa ketika terdapat banyak prospek pekerjaan dan tingkat pengangguran rendah, menyebabkan tingkat kemiskinan ikut rendah. Kenyataan yang terjadi, di Sumatera Barat di tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,88 persen dan terjadi penurunan di tahun 2021 menjadi 6,52

persen. Sedangkan tingkat kemiskinan pada 2020 sebesar 6,28 persen mengalami kenaikan pada 2021 sebesar 6,63 persen.

Dari penjabaran pada latar belakang, rumusan masalah yang ditinjau dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan di Sumatera Barat?
- 2. Implikasi kebijakan apa yang dapat dilakukan guna menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat?

# 1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
- 2. Menganalisis kontribusi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan guna memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan manusia berdasarkan hasil penelitian.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- 1. Bagi peneliti berguna untuk memperluas pemahaman berkenaan dengan faktor- faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.
- 2. Penelitian ini dapat memberi referensi bagi peneliti lainnya yang akan melakukan studi serupa.

